

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.1	59.759.521.136,00	50.053.620.642,00	9.705.900.494,00	16,24
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.2	3.752.681.349,66	4.113.779.708,00	(361.098.358,34)	(9,62)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.3	10.967.609.930,00	14.112.352.048,00	(3.144.742.118,00)	(28,67)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	5.4.1.1.4	152.443.477.256,52	131.764.246.283,83	20.679.230.972,69	13,57
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		226.923.289.672,18	200.043.998.681,83	26.879.290.990,35	11,85
PENDAPATAN TRANSFER					
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.1.1	71.475.765.000,00	86.824.086.000,00	(15.348.321.000,00)	(21,47)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.4.1.2.1.2	176.563.746.000,00	260.374.481.000,00	(83.810.735.000,00)	(47,47)
Dana Alokasi Umum	5.4.1.2.1.3	919.817.829.148,00	925.026.162.597,00	(5.208.333.449,00)	(0,57)
Dana Alokasi Khusus	5.4.1.2.1.4	310.083.135.457,00	320.731.403.822,00	(10.648.268.365,00)	(3,43)
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.477.940.475.605,00	1.592.956.133.419,00	(115.015.657.814,00)	(7,78)
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	5.4.1.2.2				
Dana Penyesuaian		186.238.341.500,00	192.085.204.000,00	(5.846.862.500,00)	(3,14)
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		186.238.341.500,00	192.085.204.000,00	(5.846.862.500,00)	(3,14)
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA					
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.4.1.2.3.1	137.476.373.766,49	139.321.233.947,65	(1.844.860.181,16)	(1,34)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		137.476.373.766,49	139.321.233.947,65	(1.844.860.181,16)	(1,34)
BANTUAN KEUANGAN					
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	5.4.1.2.3.2	6.506.703.000,00	15.587.916.000,00	(9.081.213.000,00)	(139,57)
Jumlah Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan		6.506.703.000,00	15.587.916.000,00	(9.081.213.000,00)	(139,57)
Jumlah Pendapatan Transfer		1.808.161.893.871,49	1.939.950.487.366,65	(131.788.593.495,16)	(7,29)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.4.1.3.1	41.769.849.100,65	10.865.821.490,58	30.904.027.610,07	73,99
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		41.769.849.100,65	10.865.821.490,58	30.904.027.610,07	73,99
JUMLAH PENDAPATAN		2.076.855.032.644,32	2.150.860.307.539,06	(74.005.274.894,74)	(3,56)
BEBAN					
Beban Pegawai	5.4.2.1	869.312.151.244,72	783.911.726.812,31	85.400.424.432,41	9,82
Beban Persediaan	5.4.2.2	95.882.967.138,05	168.833.727.602,64	(72.950.760.464,59)	(76,08)
Beban Jasa	5.4.2.3	444.612.315.030,27	396.389.519.696,27	48.222.795.334,00	10,85
Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	26.951.728.374,06	33.510.223.299,72	(6.558.494.925,66)	(24,33)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	126.590.329.483,50	144.977.473.403,00	(18.387.143.919,50)	(14,52)
Beban Subsidi	5.4.2.6	259.876.000,00	0,00	259.876.000,00	100,00
Beban Hibah	5.4.2.7	110.962.245.385,99	74.674.482.099,76	36.287.763.286,23	32,70
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.8	299.000.000,00	500.126.230,00	(201.126.230,00)	(67,27)

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.9	213.365.850.298,08	222.329.807.792,82	(8.963.957.494,74)	(4,20)
Beban Penyisihan	5.4.2.10	10.324.362.606,05	14.673.018.200,48	(4.348.655.594,43)	(42,12)
Beban Transfer	5.4.2.11	305.854.767.508,00	312.437.346.475,00	(6.582.578.967,00)	(2,15)
Beban Lain-lain	5.4.2.12	0,00	5.568.061.700,00	(5.568.061.700,00)	0,00
JUMLAH BEBAN		2.204.415.593.068,72	2.157.805.513.312,00	46.610.079.756,72	2,11
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	(127.560.560.424,40)	(6.945.205.772,94)	(120.615.354.651,46)	94,56
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Defisit Penjualan Aset Non lancar		(1.078.960.903,78)	(3.810.809.920,99)	2.731.849.017,21	(253,19)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		90.832.972,00	1.497.977.094,90	(1.407.144.122,90)	(1.549,16)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(988.127.931,78)	(2.312.832.826,09)	1.324.704.894,31	(134,06)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(128.548.688.356,18)	(9.258.038.599,03)	(119.290.649.757,15)	92,80
POS LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa	5.4.4	1.157.985.156,00	183.454.962,00	974.530.194,00	84,16
POS LUAR BIASA		(1.157.985.156,00)	(183.454.962,00)	(974.530.194,00)	84,16
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.5	(129.706.673.512,18)	(9.441.493.561,03)	(120.265.179.951,15)	92,72

BUPATI INDRAGIRI HILIR



HERMAN



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 31 Desember 2024, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.3.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjelaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah, yaitu penyusunan anggaran pendapatan daerah tidak memiliki dasar yang memadai dan manajemen kas belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah, yang mengakibatkan ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyelesaikan seluruh realisasi belanja tahun berjalan. Hal tersebut menimbulkan kewajiban jangka pendek diantaranya berupa Utang Belanja sebesar Rp88.036.612.607,09 yang membebani anggaran tahun berikutnya. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15.B/LHP/XVIII.PEK/05/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pekanbaru, 26 Mei 2025
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Riau
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Mas Agung M. Noor, S.ST., MSi., Ak., CA, CFE, CSFA
Register Negara Akuntan No. D-27.373